



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN *TELEMEDICINE* ANTAR FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan kepulauan, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui *telemedicine*;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN *TELEMEDICINE* ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

5. Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan *Telemedicine* adalah *Telemedicine* yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi *Telemedicine*.
8. Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi *Telemedicine*.
9. *Expertise* adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, *image* atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegakan diagnosa pasien.

BAB II PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 2

Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan:
 - a. teleradiologi;
 - b. teleelektrokardiografi;
 - c. teleultrasonografi;
 - d. telekonsultasi klinis; dan
 - e. pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik *image* dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
- (3) Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
- (4) Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.
- (5) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.
- (6) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video.
- (7) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasyankes Penyelenggara

Pasal 5

Fasyankes penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.

Pasal 6

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan.
- (3) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit, Fasyankes tingkat pertama, dan Fasyankes lain.

Pasal 7

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
 - a. menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine*;
 - b. menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan *Telemedicine* melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit;
 - c. mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan *Telemedicine* dari Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
 - a. menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine*;
 - b. menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan *Telemedicine* melalui keputusan pimpinan Fasyankes;
 - c. mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang menyelenggarakan Pelayanan *Telemedicine* harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana, prasarana, peralatan; dan
- c. aplikasi.

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis/dokter subspesialis;
 - c. tenaga kesehatan lain; dan
 - d. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
- (2) Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasyankes Pemberi Konsultasi dapat memiliki ahli lain di bidang kesehatan.
- (3) Dokter spesialis/dokter subspesialis dan ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan sumber daya kesehatan yang memberikan *Expertise* dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis Pelayanan *Telemedicine*.

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Peminta Konsultasi paling sedikit berupa:
 - a. dokter/dokter spesialis;
 - b. tenaga kesehatan lain; dan
 - c. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
- (2) Dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya kesehatan yang meminta *Expertise* sesuai dengan jenis Pelayanan *Telemedicine*.

- (3) Dalam hal Fasyankes Peminta Konsultasi tidak memiliki dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsultasi dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus terlatih menggunakan teknologi dan peralatan, serta memiliki keterampilan komunikasi dan perilaku yang sesuai dalam Pelayanan *Telemedicine*.

Pasal 11

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bangunan/ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan *Telemedicine*, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung Pelayanan *Telemedicine*.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi peralatan medis dan nonmedis yang menunjang Pelayanan *Telemedicine*.
- (4) Sarana, Prasarana, dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan aplikasi *Telemedicine* dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka interoperabilitas data secara otomatis dan *real time*.
- (4) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa data agregat Pelayanan *Telemedicine*.

Bagian Keempat
Registrasi

Pasal 13

- (1) Setiap Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang telah memenuhi persyaratan harus teregistrasi.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengajuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan dan/atau aplikasi yang digunakan.

Bagian Kelima
Expertise

Pasal 14

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi harus menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau menerbitkan *Expertise* kepada Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Jawaban konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan medis dari dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis.
- (3) Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan *Expertise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan paling sedikit nama dokter peminta, dokter spesialis/dokter subspesialis atau ahli lainnya yang terkait pembuat *Expertise*, data identitas pasien, dan keterangan lain yang dibutuhkan.
- (4) Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan *Expertise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicetak dan merupakan bagian dari rekam medis pasien.
- (5) Dalam hal komunikasi, tulisan, gambar, video, audio, atau keterangan lain yang dibutuhkan tidak jelas diterima, dokter spesialis/dokter subspesialis atau ahli lainnya pemberi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta pemeriksaan atau pengiriman ulang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III BIAYA

Pasal 15

- (1) Biaya Pelayanan *Telemedicine* dibebankan kepada masyarakat pengguna layanan melalui Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (2) Besaran biaya Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program jaminan kesehatan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Selain untuk program jaminan kesehatan, Fasyankes dapat menetapkan besaran biaya Pelayanan *Telemedicine* melalui kesepakatan antar Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.
- (4) Penetapan besaran biaya Pelayanan *Telemedicine* melalui kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pengajuan klaim biaya Pelayanan *Telemedicine* dilakukan melalui aplikasi.
- (2) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki hak:
 - a. menerima informasi medis berupa gambar, citra (*image*), teks, biosinyal, video dan/atau suara yang baik dengan menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberi *Expertise*; dan
 - b. menerima imbalan jasa Pelayanan *Telemedicine*.
- (2) Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki kewajiban:
 - a. menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan *Expertise* sesuai standar;

- b. menjaga kerahasiaan data pasien;
- c. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *Expertise*; dan
- d. menyediakan waktu konsultasi pada jam kerja Fasyankes atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara Fasyankes Pemberi konsultasi dengan Fasyankes Penerima Konsultasi.

Pasal 18

- (1) Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki hak:
 - a. memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima *Expertise* sesuai standar; dan
 - b. menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *Expertise*.
- (2) Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan *Telemedicine* memiliki kewajiban:
 - a. mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh *Expertise*;
 - b. menjaga kerahasiaan data pasien; dan
 - c. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *Expertise* kepada pasien;

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan Pelayanan *Telemedicine* sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* di Provinsi Maluku dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Agustus 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 Agustus 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 249.